

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949.

Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasca Amandemen I-IV.

UU Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Nomor 518).

UU Nomor 10 Tahun 1966 Tentang Kedudukan MPRS dan DPR-GR Menjelang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2813).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (Lembaran Negara 1969 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (Lembaran Negara 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara 1985 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3282).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara 1995 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3600).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (Lembaran Negara 1999 Nomor 24; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara 2003 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara 2009 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043).

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara 2014 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 2014 Nomor 292; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 29; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187).

Konstitusi-Konstitusi Negara Lain

The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines.

Constitution of the Oriental Republic of Uruguay.

Political Constitution of the Republic of Costa Rica.

Constitution of the Argentine Nation.

United States Constitution.

Putusan Pengadilan

Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018.

Putusan MK Nomor 18/PUU-XVI/2018.

Putusan MK Nomor 25/PUU-XVI/2018.

Putusan MK Nomor 26/PUU-XVI/2018.

Putusan MK Nomor 34/PUU-XVI/2018.

Putusan MK Nomor 37/PUU-XV/2017.

Putusan MK Nomor 40/PUU-XV/2017.

Putusan MK Nomor 22/PUU-XIII/2015.

Peraturan Tata Tertib DPR

Tatib DPR Tahun 1997 (Keputusan DPR RI No. 9/DPR RI/I/1997-1998 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI).

Tatib DPR 2001 (Keputusan DPR RI No. 16/DPR RI/I/1999-2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI).

Tatib DPR 2001 (Keputusan DPR RI No. 03A/DPR RI/I/2001-2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI)

Tatib DPR 2005 (Keputusan DPR RI No. 08/DPR RI/I/2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI).

Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib.

Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607).

Jurnal

- Andrews, Matt. 2008. "The Good Governance Agenda: Beyond Indicators without Theory", *Oxford Development Studies*, 36 (4), December.
- Cheibub, José Antonio, Jennifer Gandhi, dan James Raymond Vreeland. 2010. "Democracy and Dictatorship Revisited", *Public Choice*, 143: 67–101.
- Claus, Laurence. 2005. "Montesquieu's Mistakes and the True Meaning of Separation", *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 25, No. 3, 419-451.
- Ackerman, B. 2000. "The New Separation of Power", *Harvard Law Review*, 113:724.
- Ahmed, N., 2010. "Parliamentary Committees and Parliamentary Government in Bangladesh", *Contemporary South Asia*, 10(1):11-36.
- Alexander, Larry. 2013. *Originalism, the Why and the What*, 82 *Fordham Law Review*, 539.
- Alrasyid, Harun. 2002. "Kajian Sistem Pemerintahan dan Ruang Lingkupnya", *Basement*. Vol. 3., No. III, Juni.
- Andrews, M. 2008. "The Good Governance Agenda: Beyond Indicators without Theory", *Oxford Development Studies*, 36(4), December.
- Asshiddiqie, J. 2007. "Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945", *Jurnal Negarawan*, 6, November.
- Blondel, J. 1970. "Legislative Behaviour: Some Steps towards Cross-national Measurement", *Government and Opposition*, 5:67–85.
- Brown, Kimberly N. 2013. "'We the People,' Constitutional Accountability, and Outsourcing Government", *Indiana Law Journal*, Vol. 88:4.
- Burnell, P.J. 2001. "Financial Indiscipline in Zambia's Third Republic: The Role of Parliamentary Scrutiny", *Journal of Legislative Studies*, 7(3).
- Cheibub, J.A., Elkins, Z., and Ginsburg, T. 2013. "Beyond Presidentialism and Parliamentarism", *British Journal of Political Science*, 44:515-544, November.
- Ellis, Andrew. 2002. "The Indonesian Constitutional Transition: Conservatism or Fundamental Change?", *Singapore Journal of International & Comparative Law* 124, 6.

- Garvey, T. and Dolan, A.M. 2014. "Congress's Contempt Power and the Enforcement of Congressional Subpoenas: A Sketch", *Congressional Research Service*, April 10.
- Isra, S. 2013. "Hubungan Presiden dan DPR", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 3.
- Johnson, L.K. 2004. "Congressional Supervision of America's Secret Agencies: The Experience and Legacy of the Church Committee", *Public Administration Review*, 64(1).
- Kusuma, R.M. AB. 2004. "Sistem Pemerintahan Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, 1(1).
- Lysenko, Vladimir. 1994. "Toward Presidential Rule", *Journal of Democracy*, 5(2).
- Magenda, B.D. 2001. "Dinamika Hubungan Eksekutif-Legislatif di Indonesia," *Jurnal Civility*, 1(1), Juli-September.
- Mahendra, Y.I. 2007. "Sistem Ketatanegaraan Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Negarawan*, 3, Februari.
- McGinnis, John O. dan Michael B. Rappaport. 2019. "Unifying Original Intent and Original Public Meaning", *Northwestern University Law Review*, 113: 6.
- Mintzberg, H., 1985. "The Organization as Political Arena", *Journal of Management Studies*, 22:133-154.
- Nainggolan, P.P., 2003. "UU Pemilu, UU Susduk, dan Konsekuensinya Terhadap Kinerja DPR: Suatu Analisis Komparatif." *Analisis CSIS*, XXXII(4).
- Pelizzo, R. and Stapenhurst, R. 2004. "Tools for Legislative Oversight: An Empirical Investigation", *Quaderni di Scienza Politica/ Notebook of Political Science*, 11(1), January.
- , 2012. "Improving Democracy and Accountability in Ghana: The Importance of Parliamentary Oversight Tools", *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, 25(2), April.
- , 2014. "Oversight Effectiveness and Political Will: Some Lessons from West Africa", *The Journal of Legislative Studies*, 20(2):255-261.

- , Sahgal, V. and Woodley, W. 2006. "What Makes Public Accounts Committees Work? A Comparative Analysis", *Politics & Policy*, 34(4): 774- 793.
- Persson, A. dan Sjöstedt. M. 2012. Responsive and Responsible Leaders: A Matter of Political Will?, *Perspectives on Politics*, 10(3):617-632.
- Peterson, T. D. 2002. "Contempt of Congress v. Executive Privilege", *Journal of Constitutional Law*, 14 (1).
- Pildes, R.H., 2004. "The Constitutionalization of Democratic Politics", *Harvard Law Review*, 118:1.
- Powell, H.J. 1985. "The Original Understanding of Original Intent", *Harvard Law Review*, 98 (5).
- , 1987. "Rules for Originalists", *Virginia Law Review*, 73: 4.
- Ridlwan, Zulkarnain. 2015. "Cita Demokrasi Indonesia Dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemerintah", *Jurnal Konstitusi*, 12(2):305-327, Juni.
- dan Enny Nurbaningsih. 2018. "Law Revision on Indonesian Parliament's Oversight Function: Facing the Challenges of Democracy", *KnE Social Sciences & Humanities*, 1st International Conference on South East Asia Studies (ICSEAS), 3 (5), 573-593.
- dan Zainal A. Mochtar. 2019. "Regulate DPR's Committees: Making Indonesian Presidential System More Representative", *Fiat Justisia*, Vol. 13, No. 2, April-Juni.
- Samosir, Daniel. "Faktor-Faktor yang Menyebabkan Materi Muatan Undang-Undang Bertentangan dengan UUD 1945" *Jurnal Konstitusi*, 12 (4), Desember 2015.
- Rose-Ackerman, S, Diane A. D., dan Natalia V. 2011. "Hyper-Presidentialism: Separation of Powers without Checks and Balances in Argentina and the Philippines", *Berkeley Journal of International Law*, Vol. 29:1.
- Rush, M. 1982. "Parliamentary Committees and Parliamentary Government: the British and Canadian Experiences", *The Journal of Commonwealth and Comparative Politics*, 20(2).
- Russo, F. and Wiberg. M. 2010. "Parliamentary Questioning in 17 European Parliaments: Some Step towards Comparison", *Journal of Political Science*, 16(2): 215-232.

- Saalfeld, T. 2000. "Members of Parliament and Governments in Western Europe: Agency Relations and Problems of Oversight", *European Journal of Political Research*, 37(3).
- Safaat, M. Ali, Aan Eko Widiarto dan Fajar Laksono Suroso. 2017. "Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009 - 2013", *Jurnal Konstitusi*, 14: 2, Juni.
- Soemantri, Sri. 2003. "Sistem Pemerintahan Republik Indonesia". *Mimbar Hukum*. Volume VI, Nomor 44.
- Shaffer, G. 2004. "Parliamentary Oversight of WTO Rule-Making: The Political, Normative, and Practical Context", *Journal of International Economic Law*, 7(3): 629-654.
- Stapenhurst, R., Jacobs, K. and Olaore, O. 2016. "Legislative Oversight in Nigeria: an Empirical Review and Assesment", *The Journal of Legislatif Studies*, 22:1-29.
- Stepan, A. and Skach, C. 1993. "Constitutional Frameworks and Democratic Consolidation", *World Politics*, 46 (1).
- Strøm, K.W. 2000. "Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies", *European Journal of Political Research*, 37(3).
- Zamrony. 2010. "Hak Subpoena Sebagai Instrumen Pendukung Pelaksanaan Fungsi DPR", *Jurnal Keadilan Progresif*, I(1), September.
- Zoelva, H. 2006. "Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Setelah Perubahan UUD 1945", *Jurnal Negarawan*, 1, Agustus.

Tesis/Disertasi

- Hanan, Djayadi. 2012. "Making Presidentialism Work: Legislative and Executive Interaction in Indonesian Democracy", *Dissertation*, Doctoral Program in Political Science at Graduate School of the Ohio State University.
- Hasibuan, Albert. 1992. "Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode Tahun 1977-1992", *Disertasi*, Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Hukum UGM.
- Husein, La Ode. 2004. "Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menilai Akuntabilitas Pemerintah Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Disertasi*, Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

- Ibrahim R. 2003. "Sistem Pengawasan Konstitusional Antara Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif Dalam Pembaruan Undang-Undang Dasar 1945", *Disertasi*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Isra Saldi. 2009. "Pergeseran Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945", *Disertasi*. Yogyakarta: PDIH FH Universitas Gadjah Mada.
- Jaseckova, Jana. 2013. "Changing Parliamentary Functions: European Perspectives", *Dissertation*, Department of Legal Studies – Central European University, Budapest.
- King, Blair Andrew. 2004. "Empowering The Presidency: Interests and Perceptions in Indonesia's Constitutional Reforms, 1999-2002", *Dissertation*, Graduate School of The Ohio State University.
- Mochtar, Zainal Arifin. 2012. "Penataan Lembaga Negara Independen Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Rahman, Aulia A. 2007. "Sistem Pemerintahan Presidentil Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945: Studi Ilmiah tentang Tipe Rezim, Tipe Institusi, dan Tipe Konsitusi" *Disertasi*, Jakarta: PDIH FH Universitas Indonesia.
- Ridlwan, Zulkarnain. 2010. "Perkembangan Pengaturan atas Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia". *Tesis*. Yogyakarta: Program Magister Hukum UGM.
- Robinson, Ann. 1972. "Select Committees and The Functions of Parliament" *Dissertation*. Faculty of Graduate Studies and Research of Doctor of Philosophy. Montreal: Department of Economics and Political Science McGill University.
- Tambunan, Arifin Sari Surungantan. 1998. *Fungsi DPR RI Menurut UUD 1945: Suatu Studi Analisis Mengenai Pengaturannya Tahun 1966-1997*. *Disertasi*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Buku/ Paper/ Makalah/Prosiding

- Aning S, Floriberta. 2005. *100 Tokoh yang Mengubah Indonesia: Biografi Singkat Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah Indonesia di Abad 20*, Yogyakarta: Penerbit Narasi.
- Anshari, Endang Saifuddin. 1997. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, Edisi 3, Jakarta: Gema Insani Press.

- Asimow, Michael R. 2002. *Administrative Law*, 13th Edition. Minnesota: West Academic.
- Asshiddiqie, Jimly. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- , 1996. *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konsitusi Berbagai Negara*. Jakarta: UI Press.
- , 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- , 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitiaan MKRI.
- , 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK.
- , 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Buana Ilmu Populer.
- , 2011. *Konstitusi & Konstitusionalisme di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , dan Zainal A.M. Husein. 2005. *HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi - Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Atre, B.R. 2001. *Legislative Drafting Principles and Techniques*, (Delhi: Universal Law Publishing.
- Azhari, Muhammad Tahir. 1992. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam - Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Bahar, Saafroedin (Peny.). 1995. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Ball, Alan R. 1988. *Modern Politics and Government*, Edisi ke-4. Hampshire and London: Macmillan Education.
- , dan Brainard Guy Peters. 2000. *Modern Politics and Government*. 6th Edition. London: Macmillan Press.

- Barber, Sotirios A. dan James E. Fleming. 2007. *Constitutional Interpretation – The Basic Questions*. New York: Oxford University Press.
- Beetham, David dan IPU. 2008. *Evaluating Parliament: A Self-assessment Toolkit for Parliaments*. Geneva: IPU.
- Benda, Susan. 1997. ‘Committees In Legislatures: A Division of Labour’ dalam Lawrence Longley and Attila Agh (eds.). *The Changing Roles of Parliamentary Committees*. Appleton: Research Committee of Legislative Specialists, International Political Science Association.
- Berns, Walter. 2006. *Democracy and the Constitution*. Washington D.C.: The American Enterprise Institute.
- Blondel, Jean. 1973. *Comparative Legislatures*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Bourchier, David. 2015. *Illiberal Democracy in Indonesia: The Ideology of the Family State*. London dan New York: Routledge.
- Brannen Jr., Daniel E. 2005. *Checks and Balances: The Three Branches of the American Government*, Vol. 2. Michigan: Thomson Gale.
- Budiardjo, Miriam dan Ambong. 1995. *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- , 2004. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet-26, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- , 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chaidir, Ellydar dan Sudi Fahmi. 2010. *Hukum dan Perbandingan Konstitusi*. Yogyakarta: Total Media.
- Cheibub, José Antonio and Fernando Limongi. 2011. ‘Legislative-Executive Relations’, dalam Tom Ginsburg and Rosalind Dixon (Ed.). *Comparative Constitutional Law*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
- , 2007, *Presidentialism, Parliamentarism, and Democracy*, New York: Cambridge University Press.
- Crick, Bernard. 1968. *The Reform of Parliament*, 2nd Edition, London: t.p.
- Crouch, Harold. 1986. *Militer dan Politik di Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Cruz, Peter de. 1999. *Comparative Law in a Changing World*, London: Cavendish Publishing.

- Diantha, I Made Pasek. 1990. *Tiga Tipe Pokok Sistem Pemerintahan dalam Demokrasi Modern*. Bandung: Abardin.
- Dicey, A.V. 2009. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution (Pengantar Sutudi Hukum Konstitusi)*. Bandung: Nusa Media.
- Ducat, Craig R. 2009. *Constitutional Interpretation*, Ninth Edition. Boston: Wadsworth Cengage Learning.
- Duluc, F., Toornstra, D., Hubli, S., Chauvel, C., Babic, N., and Richardson, A. (A Working Group comprising representatives from the French National Assembly, the European Parliament, UNDP, NDI, and IPU.), 2014. *Common Principles for Support to Parliaments*. France: Imprimerie Courand et Associés.
- Dworkin, Ronald. dan Frank Henry Sommer. 2006. *Justice in Robes*. Cambridge: Harvard University Press.
- Emy, Hugh. 1978. *The Politics of Australian Democracy*. Melbourne: Macmillan.
- Fellmeth, Aaron X. dan Maurice Horwitz. 2009. *Guide to Latin in International Law*. New York: Oxford University Press.
- Fuady, Munir. 2009. *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Funk, William. 2008. *Introduction to American Constitutional Structure*. Minnesota: Thomas/West.
- Garvey, John H. dan Thomas Alexander Aleinikoff. 1999. *Modern Constitutional Theory: A Reader*, 4th Edition. Minnesota: West Publishing Co.
- Golding, Martin P. dan William A. Edmundson (Eds.). 2005. *Philosophy of Law and Legal Theory*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Goldsworthy, Jeffrey (Ed.). 2006. *Interpreting Constitutions, A Comparative Study*. New York: Oxford University Press.
- Gondokusumo, Djody. 1951. *Parlemen Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hague, Rod and Martin Harrop. 2004. *Comparative Government and Politics – An Introduction*, 6th Edition, New York: Palgrave Macmillan.
- Halkis, Mhd. 2017. *Konstelasi Politik Indonesia – Pancasila dalam Analisis Fenomenologi Hermeneutika*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.

- Harriger, Katy J. (Ed.). 2003. *Understanding Constitutional Principles: Separation Powers Documents and Commentary*. Washington DC: CQ Press.
- Harun, Refly. 2016. *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Ke Depan*. Jakarta: RajaGrafindo.
- . 2019. *Penafsiran Konstitusi – How to Interpret the Constitution*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Hass, Karen L. (Prepared by.). 2015. *Rules of the House of Representatives – 114th Congress*, Clerk of the House of Representatives, January 6.
- Hatta, Mohammad. 1976. *Kumpulan Karangan (I)*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- Held, David. 1990. *Models of Democracy*. Polity Press: London.
- Hix, Simon and Bjorn Hoyland, 2014. “Political Behaviour in the European Parliament”, dalam Shane Martin, Thomas Saalfeld, dan Kaare W. Strom, *The Oxford Handbook of Legislative Studies*, NY: Oxford University Press.
- Hoecke, Mark van (Ed.). 2011. *Methodologies of Legal Research, Which Kind of Method for What Kind of Discipline*, (Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing.
- Huda, Ni'matul. 2011. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Huscroft, Grant dan Bradley W. Miller (Eds). 2011. *The Challenge of Originalism – Theories of Constitutional Interpretation*. New York: Cambridge University Press.
- Indrayana, Denny. 2007. “Mendesain Presidensial yang efektif”, *Makalah*, disampaikan dalam Pertemuan Ahli Hukum Tata Negara “Melanjutkan Perubahan UUD 1945 Negara RI”, di Bukittinggi, 11-13 Mei.
- Isra, Saldi. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- . 2019. *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*. Depok: Rajawali Pers.
- Istanto, F. Sugeng. 2007. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV. Ganda.
- Jogerst, Michael. 1993. *Reform in the British House of Commons*. Lexington: The University of Kentucky Press.

- Kamis, Margarito. 2014. *Pembatasan Kekuasaan Presiden; Pergeseran Kekuasaan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945*. Malang: Setara Press.
- Kennelly, James (Ed.). 2013. *International Parliamentary Conference on the Post-2015 Development Agenda - Toolkit for Parliamentarians*. London: Commonwealth Parliamentary Association.
- King, Anthony. 1981. 'How to Strengthen Legislatures-Assuming That We Want To' dalam Norman Ornstein (Ed.), *The Role of the Legislature in Western Democracies*. Washington: American Enterprise Institute for Public Policy Research.
- Kosar, Kevin R. 2004. "Shutdown of the Federal Government: Cases, Effects, and Process", *Congressional Research Service (CRS) Report for Congress*, Order Code 98-844, The Library of Congress, September 2004.
- Kousser, Thad and Scott A. MacKenzie, 2014. "Legislative Careers", dalam Shane Martin, Thomas Saalfeld, dan Kaare W. Strom, *The Oxford Handbook of Legislative Studies*, NY: Oxford University Press.
- Krehbiel, Keith. 1991. *Information and Legislative Organisation*, Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Kreppel, Amie. "Typologies and Classifications", 2014, dalam Shane Martin, Thomas Saalfeld, dan Kaare W. Strom, *The Oxford Handbook of Legislative Studies*, NY: Oxford University Press.
- Krotoszynski Jr., Ronald J. 2011. "The Separation of Legislative and Executive Powers", dalam Tom Ginsburg dan Rosalind Dixon, *Comparative Constitutional Law*. Cheltenham, UK dan Northampton, USA: Edward Elgar.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. 1985. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PSHTN UI.
- Kusuma, R.M. AB. 2009. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Laver, Michael. 2006. "Legislatures and Parliaments in Comparative Context", dalam Barry R. Weingast dan Donald A. Wittman (eds), *The Oxford Handbook of Political Economy*. Oxford: Oxford University Press.
- Lees, John D., and Shaw, M. 1979. *Committees in Legislatures: A Comparative Analysis*, Durham: Duke University Press.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 1980. *Penelitian Fungsi Parlemen dalam Sejarah Studi tentang Volksraad*. Jakarta: LIPI.

- Lijphart, Arend. 2008. *Thinking About Democracy – Power Sharing and Majority Rule in Theory and Practice*. New York and Oxford: Routledge.
- . 1999. *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. Yale University Press.
- . 1984. *Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*, New Haven and London: Yale University Press.
- Lubis, Indra Surya (ed), 2001. *Bahaya Tirani DPR- Konflik DPR vs Presiden*. Jakarta: Lembaga Studi Politik “Merdeka”.
- Maddex, Robert L. 1996. *The Illustrated Dictionary of Constitutional Concepts*. Washington: Congressional Quarterly Inc.
- . 2008. *Constitutions of the World*, Third Edition. Washington: CQ Press.
- Mahfud MD, Moh. 1993. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- . 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta
- Mahmuzar. 2010. *Sistem Pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*. Bandung: Nusamedia.
- Manan, Bagir. 2003. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH UII.
- Marbun, B. N., 1992. *DPR-RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Martin, Lanny W. dan Georg Vanberg. 2014. “Legislative Institutions and Coalition Government”, dalam Shane Martin, Thomas Saalfeld, dan Kaare W. Strom, *The Oxford Handbook of Legislative Studies*, NY: Oxford University Press.
- Marzuki, Masnur. 2014. “Prospek Dan Tantangan Parlemen Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan” *Makalah*, disampaikan pada Seminar “*Prospek dan Tantangan Pelaksanaan Tugas Parlemen 2014-2019*” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta bekerjasama dengan Hanns Seidel Foundation, Yogyakarta, 10 Oktober.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-4. Jakarta: Kencana.
- Mason, Anthony. 1996. "The Interpretation of a Constitution in a Modern Liberal Democracy", dalam Charles Sampford (Ed.), *Interpreting Constitutions Theories, Principles and Institutions*. Sydney: The Federation Press.
- Mattson, Ingvar and Kaare Strøm, 1995. 'Parliamentary Committees', dalam H. Döring (ed.). *Parliaments and Majority Rule in Western Europe*, New York: St Martin's Press.
- McIlwain, C.H. 1974. *Constitutionalism: Ancient and Modern*. Ithaca: Cornell University Press.
- McIver, Robert M. 1950. *The Modern State*. Oxford: Oxford University Press.
- Mezey, Michael L. 1979. *Comparative Legislatures*. Durham NC: Duke University Press.
- 1998. 'Executive-Legislative Relations', dalam G. Kuria (Ed.). 1998. *World Encyclopedia of Parliaments and Legislatures*. Washington DC: Congressional Quarterly Inc.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Saldi Isra. 2018. *Parlemen Dua Kamar: Analisis Perbandingan Menuju Sistem Bikameral Efektif*. Bantul: Genta Publishing.
- Montesqueiu. 2011. *The Spirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*. Bandung: Nusamedia.
- Moreso, Jose Juan. 1998. *Legal Indeterminacy and Constitutional Interpretation*. Dordrecht: Springer Science+Business Media.
- Motter, Alessandro. and Karin Riedl. 2013. *Parliamentary Oversight of International Loan Agreements and Related Processes, a Global Survey*. Geneva: The Inter-Parliamentary Union (IPU) and the World Bank.
- Mulyosusarno, Soewoto. 2004. *Pembaruan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*. Surabaya: In-TRANS.
- Noor, Firman. 2009. "Menimbang Masa Depan Sistem Presidensial di Indonesia Problematika Demokrasi dan Kebutuhan Perbaikan Sistemik", dalam Moch. Nurhasim dan Ikrar Nusa Bhakti, *Sistem Presidensial & Sosok Presiden Ideal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- O'Neill, Johnathan. 2007. *Originalism in American Law and Politics – A Constitutional History*, (Maryland: The Johns Hopkins University Press.

- Packenham, Robert. 1970. 'Legislatures and Political Development', dalam Norton, P. (Ed.) *Legislatures*. Oxford: Oxford University Press.
- Palguna, I Dewa Gede. 2013. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) – Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Patrick, John J., Richard M. Pious, and Donald A. Ritchie. 2001. *The Oxford guide to the United States government*, New York: Oxford University Press.
- Pelizzo, Riccardo dan Rick Stapenhurst. 2004. "Tools for Legislative Oversight: An Empirical Investigation", *World Bank Policy Research Working Paper 3388*, September.
- . 2014. *Government Accountability and Legislative Oversight*, New York: Routledge.
- Plano, Jack C. dan Milton Greenberg 2002. *The American Political Dictionary*, Eleventh Edition. (Belmont: Wadsworth/Thomson Learning.
- Poerbopranoto, Koentjoro. 1987. *Sistem Pemerintahan Demokrasi*. Bandung: Eresco.
- Polsby, N.W., 1975. "Legislatures", dalam F.I. Greenstein and N.W. Polsby (eds.). *Handbook of Political Science*, Reading: Addison-Wesley.
- Powell, G. Bingham. 1982. *Contemporary Democracies: Participation, Stability, and Violence*. Cambridge MA: Harvard University Press.
- Power, Greg. 2012. *Global Parliamentary Report; The changing nature of parliamentary representatif*. Denmark: UNDP and IPU.
- Quarterly Inc, Congressional. 2000. *Guide to Congress*, Volume I-Fifth Edition. Washington DC: CQ Press.
- Rakyat, Dewan Perwakilan. 1983. *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1971-1977*, Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Rakove, Jack N. (Ed.). 1990. *Interpreting Constitution: The Debate Over Original Intent*. Michigan: Northeastern University Press.
- Rauf, Maswadi. 2009. "Evaluasi Sistem Presidensial: Sistem Parlementer dan Sistem Presidensial di Indonesia", dalam Moch. Nurhasim dan Ikrar Nusa Bhakti, *Sistem Presidensial & Sosok Presiden Ideal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ridlwan, Zulkarnain. 2011. *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia –menguatnya instrumen pengawasan terhadap pemerintah-*, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung.

-----, dan Zainal A. Mochtar, “Strengthening the Presidential System through the Oversight Function of People’s Representative Council: Indonesia’s Case”, *Paper*, dipresentasikan dalam 2nd International Conference on South East Asia Studies (ICSEAS), 27-28 September 2017.

Ritchie, Donald A. 2010. *The U.S. Congress: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press.

Rockman, Bert A. 1985. ‘Legislative-Executive Relations and Legislative Oversight’, dalam G. Loewenburg, S. Patterson, and M. Jewell (Eds.). 1985. *Handbook of Legislative Research*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Rodee, Carlton Clymer, dkk., 2009. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Rajawali Press.

Rose, Mavis. 1991. *Indonesia Merdeka: Biografi Politik Mohammad Hatta*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Saptaningrum, Indriawati Dyah. Dkk. 2011. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Politik Transaksional: Penilaian terhadap Kebijakan HAM dalam Produk Legislasi dan Pengawasan DPR Periode 2004-2009*. Jakarta: Penerbit Elsam.

Shugart, Matthew S. dan John M. Carey. 1992. *Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics*. Cambridge: Cambridge University Press.

Soegito, A. T. 1979/ 1980. *Prof. Mr. Dr. R. Supomo*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan – Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Soehino. 2005. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.

Soekanto, Soerdjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Soemantri M, Sri. 1981. *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*. Jakarta: CV. Rajawali.

-----, 1989. *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Bandung: Citra Aditya.

- , 2004. “Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945”, dalam Soewoto Mulyosusarno, *Pembaruan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Surabaya: In-TRANS.
- Stapenhurst, R., Pelizzo, R., Olson, D.M., and Trapp, L.V. (Eds), 2008. *Legislative Oversight and Budgeting: a World Perspective*, Washington DC,: World Bank.
- , 2011. “Legislative Oversight and Curbing Corruption. Presidentialism and Parliamentarianism Revisited”, *Unpublished PhD thesis*. Canberra: Australian National University.
- Steinberger, Peter J. 2004. *The Idea of the State*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Strong, C.F. 1975. *Modern Political Constitution An Introduction to the Comparative Study of their History and Existing Form*. London: Sidwick & Jackson.
- , 2005. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi tentang Perbandingan Sejarah dan Bentuk*, Cetakan ke-10, Bandung: Penerbit Nusamedia.
- Subekti, Valina Singka. 2008. *Menyusun Konstitusi Transisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sujamto. 1994. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suleman, Zulfikri. 2010. *Demokrasi Untuk Indonesia – Pemikiran Politik Bung Hatta*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Suny, Ismail. 1978. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru.
- Surdiasis, Fransiskus (Ed.), 2006. *Partai Politik pun Berguguran-* Denny J.A. Opini di Republika, Jakarta: LKiS.
- Susanti, Bivitri dkk. 2000. *Semua Harus Terwakili: Studi Mengenai Reposisi MPR, DPR, dan Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan.
- Tarr, David R. and Ann O’Connor (Eds.). 2003. *Congress A to Z*, Fourth Edition. Washington DC: CQ Press.
- Tsebelis, George. 2002. *Veto Players*. Princeton: Princeton University Press.
- Tushnet, Mark. 1999. *Taking the Constitution Away from the Courts*, New Jersey: Princeton University Press.

- Verney, Douglas V. 1959. *The Analysis of Political Systems*, London: Routledge and Kegan Paul.
- Vile, M.J.C. 1998. *Constitutionalism and the Separation of Powers*, Second Edition. Indianapolis: Liberty Fund.
- Wade, H.W.R. 1984. *Administrative Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Wahjono, Padmo. 1982. *Negara Republik Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali.
- Wehner, Joachim. 2014. "Legislatures and Public Finance", dalam Shane Martin, Thomas Saalfeld, dan Kaare W. Strom, *The Oxford Handbook of Legislative Studies*, NY: Oxford University Press.
- Wiberg, M. and A. Koura. 1994. 'The Logic of Parliamentary Questioning', dalam M. Wiberg. (Ed.). *Parliamentary Control in the Nordic Countries: Forms of Questioning and Behavioural Trends*. Helsinki: The Finnish Political Science Association.
- Wilson, J. Q., 1962. *The Amateur Democrat*, Chicago: University of Chicago Press.
- Wiratraman, R. H. Perdana. 2013. "Penelitian Sosio-Legal dan Pengembangan Pendidikan Hukum di Indonesia: Konteks, Urgensi, dan Tantangannya", *Paper*, Focus Group Discussion: Socio-Legal Research in the Future of Law Education in Indonesia, Faculty of Law Universitas Katolik Darma Cendika, 14 May.
- Yamamoto, Hironori. 2007. *Tools for Parliamentary Oversight: A Comparative Study of 88 National Parliaments*. Switzerland: Inter-Parliament Union.
- Yamin, Muhammad. 1959. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid Pertama, Jakarta: Yayasan Prapatja.
- Yuda AR, Hanta. 2010. *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi*. Jakarta: Gramedia.
- Ziegenhain, Patrick. 2008. *The Indonesian Parliament and Democratization*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Wawancara

Wawancara dengan Iwan Satriawan, S.H., M.CL., Ph.D, 5 Agustus 2017.

Wawancara dengan Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum, 2 Agustus 2017.

Artikel Online

Bruhl, Aaron-Andrew P. "Contempt of Congress" *Faculty Publications - Paper 1760*. William & Mary Law School Scholarship Repository, 2011. See: www.scholarship.law.wm.edu/facpubs

Constitution Article I, U.S. Legislative Branch, Section 1 – The Legislature. Lihat www.whitehouse.gov/1600/constitution

DPR RI, Anggota. 2016. *Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 17 Tahun 2014*, sebagaimana dapat dilihat dari: www.parlemen.net/?p=1993

IPU PARLINE database_COSTA RICA Asamblea Legislativa (Legislative Assembly), Oversight., www.archive.ipu.org/parline-e/reports/CtrlParlementaire/2073_F.htm diakses September 2016.

IPU PARLINE database_PHILIPPINES (Kapulungan Ng Mga Kinatawan), Oversight., www.archive.ipu.org/parline-e/reports/CtrlParlementaire/2253_F.htm diakses September 2016.

Johnston, Niall. *Financial Oversight: A Handbook for Parliamentarians*. Ottawa: GOPAC (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption). Dalam www.gopacnetwork.org/Docs/Oversight_handbook_EN.pdf diakses pada Januari 2016.

Pelizzo, Riccardo *Government Accountability and Legislative Oversight, - A Handbook for Legislators on Congressional Oversight in Presidential Systems*, (World Bank dan GOPAC, November 2013), dapat diakses di: www.works.bepress.com/riccardo_pelizzo/50.

Rules of the Committee on Oversight and Government Reform House of Representatives Together with Selected Rules of the House of Representatives (Including Clause 2 Of House Rule XI) and Selected Statutes of Interest, Printed for the use of the Committee on Oversight and Government Reform, [Committee Print, April 2015].

Service, Congressional Research. *Congressional Oversight Manual*, CRS Report for Congress, www.crs.gov, 19 December 2014.

Soekarno, Pidato dalam Sidang Pertama BPUPKI, tgl. 1 Juni 1945, Lihat: <https://www.library.ohio.edu/indopubs/1997/09/28/0027.html> disalin dari *Lahirnya Pancasila*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Penerbit Guntur, 1949.

Soekarno, Pidato Presiden RI pada Sidang Umum PBB ke-XV tanggal 30 September 1960 “Membangun Dunia Kembali (to build a world a new)”,
Lihat: www.kepustakaan-presiden.pnri.go.id/uploaded_files/per/speech/normal/soekarno12.pdf.

Wilkinson v. United States, 365 U.S. 399 (1961), Lihat:
<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/365/399/case.html>.

Risalah/ Naskah

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2013, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Laporan Ketua Pansus RUU Susduk 2003 pada Rapat Paripurna DPR, 9 Juli 2003.

Naskah Sambutan Mendagri pada Sidang Pleno DPR-RI tanggal 28 Januari 1999.

Naskah Sambutan Mendagri pada Rapat Pansus Pengambilan Keputusan terhadap RUU Susduk 2003, 8 Juli 2003.

Pemandangan Akhir Fraksi ABRI dalam Pembahasan RUU Bidang Politik 1999, tanggal 28 Januari 1999.

Pemandangan Umum FABRI atas Paket UU Politik 1999, 14 Oktober 1998.

Pendapat Akhir FKP terhadap RUU Bidang Politik 1999, 28 Januari 1999.

Penjelasan Pemerintah atas RUU Susduk 2003 pada Rapat Pansus DPR. 7 Mei 2003.

Penjelasan pokok-pokok atas RUU Susduk 2003 dalam Penjelasan pemerintah saat penyampaian RUU Susduk 2003 kepada DPR, Nopember 2002.

Pidato Pengantar Pada Penyerahan 3 UU Politik ke DPR, disampaikan oleh Syarwan Hamid (Mendagri), 2 Oktober 1998.

Risalah Rapat Kerja Pansus RUU Tentang Susduk 2003 – Raker ke 1 (Penjelasan Pemerintah), 7 Mei 2003.

Risalah Rapat Kerja Pansus RUU Tentang Susduk 2003 – Raker ke-1 (Pemandangan Umum Fraksi - FDIP).

Risalah Rapat Kerja Pansus RUU Tentang Susduk 2003 – Raker ke-1 (Pemandangan Umum Fraksi - FPPP), 7 Mei 2003.

Risalah Sidang UU Susduk 1999, Rapat Panja ke 8, 4 Desember 1998.

Sekretariat Jenderal MPR R.I., Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR R.I., 2003)

Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008. Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002), Tahun Sidang 1999, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

-----, 2008. *Risalah Rapat ke-2 Badan Pekerja MPR*, 6 Oktober 1999, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

-----, 2008. Risalah Rapat Ke-1 dan ke-2 Komisi C SU MPR 1999, 17-18 Oktober 1999, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

-----, 2009. Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002), Tahun Sidang 2002 Buku Satu, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR.

-----, 2008. Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2000 Buku Dua, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR.

-----, 2008. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2000 Buku Tiga*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR.

-----, 2008. Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2001 Buku Empat, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

-----, 2008. Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2000 Buku Lima, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

-----, 2008. Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002), Tahun Sidang 2000, Buku Enam, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

-----, 2008. Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002), Tahun Sidang 2000, Buku Tujuh, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

-----, 2008. Buku Ketiga Jilid 3 Risalah Rapat Paripurna ke-7 (Lanjutan 1) s/d ke-8 Tanggal 9 November 2001 Masa Sidang Tahunan 2001, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Tim Asistensi RUU MD3, *Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD*, 27 Februari 2014.

Tim Penyusun Revisi, 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 (1999-2002)*, - *Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan*, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

-----, 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 (1999-2002)*, - *Buku II Sendi-Sendi/Fundamental Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

-----, 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 (1999-2002)*, - *Buku III Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan*, Jilid I - Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

-----, 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 (1999-2002)*, - *Buku III Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan*, Jilid II - Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

-----, 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 (1999-2002)*, - *Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara*, Jilid I - Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

-----, 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 (1999-2002)*, - *Buku V*, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

-----, 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 (1999-2002)*, - *Buku VI Kekuasaan Kehakiman*, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

-----, 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 (1999-2002)*, - *Buku VII Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial*, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

-----, 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 (1999-2002)*, - *Buku VIII*, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

-----, 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 (1999-2002)*, - *Buku IX*, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

-----, 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 (1999-2002)*, - *Buku X Perubahan UUD, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan*, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Opini Surat Kabar, Majalah

Gaffar, Janedjri M. “Mempertegas Sistem Presidensial”, Opini, *Harian Seputar Indonesia*, 14 Juli 2009.

Indrayana, Denny. “Presiden Bukan Pesinden”, *Koran Sindo*, 29 Oktober 2013.

Kanal Online Instansi

www.dpr.go.id

www.house.gov

www.constituteproject.org

www.whitehouse.gov

<http://www.servat.unibe.ch/icl/>

<http://worldbank.org>

www.constitutionus.com

<http://country.eiu.com>

www.uscp.gov

www.change.org

Kanal Online Berita dan Informasi

<https://en.wikipedia.org>

www.kompas.com

<http://www.gresnews.com>

Kamus

Black, Henry Campbell,. 1990. *Black’s Law Dictionary*. St. Paul Minn: West Publishing.

Penyusun, Tim. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Wild, Susan Ellis. 2006. *Webster’s New World Law Dictionary*. New Jersey: Wiley Publishing, Inc.